

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PARIAMAN PERIODE 2014- 2019 TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN, PENINDAKAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT DAN MAKSIAT**

SKRIPSI

(Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)

OLEH :

MUHAMMAD MIFTAHUR RIZKY

1210112061

Program kekhususan : Hukum Tata Negara



Pembimbing :

Yunita Syofyan, S.H., M.H

Delfina Gusman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

ABSTRAK

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2014-2019 TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN MAKSIAT

Oleh

(Muhammad Miftahur Rizky, BP:1210112061, 60 Halaman)

Pemerintah Kota Pariaman dan DPRD Kota Pariaman telah membuat banyak Peraturan Daerah, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat. Dimana dalam hal ini DPRD harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda yang telah dibuat untuk kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun hingga saat ini masih bisa ditemukan pelanggaran terhadap Perda tersebut, sebagai contoh masih banyak Orgen Tunggal yang masih melaksanakan acara melewati batas waktu yang ditentukan dan juga masih bisa ditemukan warnet yang buka melewati batas waktu yang telah diatur didalam Perda.

Penelitian ini akan mencoba merumuskan beberapa rumusan antara lain mengenai Pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan subjek penelitian anggota Komisi I DPRD Kota Pariaman dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2013 di Kota Pariaman terutama Komisi I belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran seperti orgen tunggal dan warnet yang melebihi batas waktu yang ditentukan, selain itu DPRD memiliki hambatan baik itu kurangnya inisiatif anggota DPRD melakukan pengawasan, kurangnya Sumber Daya dan anggaran, masih banyak warga yang belum tahu Perda tersebut dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam melakukan pengawasan adanya kesadaran DPRD untuk melakukan pengawasan, memaksimalkan kinerja aparat penegak, memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dan diharapkan masyarakat Kota Pariaman dapat menerima Peraturan Daerah yang telah dibuat dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Kota Pariaman itu sendiri.

Kata kunci : fungsi pengawasan, pengawasan DPRD, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013